



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2020



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru

+62 761 33073



www.bkd.riau.go.id



email: bkd@riau.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik OPD tahun 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019	II-1
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun s/d 2019 BKD Provinsi Riau	II-2
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Renstra Tahun 2014-2018	II-10
Tabel 2.2.2 Tabel Kriteria Capaian.....	II.13
Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Riau	II-31
Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan awal Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Yang di maksud berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah adalah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,

lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan memastikan kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD. Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi juga dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD menjadi RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan berpedoman pada RKP dan

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD yang telah ditetapkan melalui Pemerintah Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS), RAPBD dan APBD Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (11/379/2017));
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau: (1,13/2018));
13. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 31);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahun 2020;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020;
3. Evaluasi hasil Rencana Kerja BKD Provinsi Riau tahun lalu; dan
4. Evaluasi hasil Rencana Kerja BKD Provinsi Riau tahun berjalan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah;

1. Terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Riau;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020;
3. Tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
4. Tercapainya sasaran dan target program kegiatan BKD Provinsi Riau tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2018 s/d Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (tahun n-1) dan Tahun 2019 Triwulan II (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 s/d Tahun 2019 Triwulan II.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 s/d tahun 2019 triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2018 s/d Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau haruslah memperhatikan capaian rencana kerja Tahun 2018 s/d Triwulan II Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai .

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun Tahun 2018 s/d Triwulan II Tahun 2019, dan realisasi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun 2019
BKD Provinsi Riau

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	9	10=5+7+9	11=10/4*100
0				Non Urusan								
0	0			NON URUSAN								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	35,12		78,42		88,07	88,07
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	16.400 surat	15.298	3.075	2.346	2.500 surat	20.144	122,83
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	14	12	12	12 bulan	38	63,33
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Unit	0	20	20	23 unit	43	215,00
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	95 unit	46	14	14	14 unit	74	77,89
0	0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa administasi keuangan	0				2 orang	2	100,00
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	14	12	12	12 bulan	38	63,33
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	14	12	12	12 bulan	38	63,33
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaann	60 bulan	14	12	12	12 bulan	38	63,33
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	36	12	12	12 bulan	60	100,00
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	14	12	12	12 bulan	38	63,33
0	0	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	53.308 orang	33.578	4.620	4.620	6.400 porsi	44.598	83,66
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	610 Kali	123	12	12	120 kali	255	41,80
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor	92 orang	60	23	23	12 bulan	95	103,26
0	0	1	22	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD						12 bulan	12	100,00
0	0	1	116	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah keikut sertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	5 kegiatan	3	1	-		3	60,00
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	68,46		99,29		136,38	136,38

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	9	2	2	2 unit	13	144,44
0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	288 Unit	202	161	160	228 unit	590	204,86
0	0	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3.040 unit	1.071	526	518	230 unit	1.819	59,84
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	85%	72,06		53,81		105	105,29
0	0	3	6	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang terbina fisik dan mental aparatur	500 orang	456	135	135	135 orang	726	145,20
0	0	3	12	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah PNS yang disumpah janjinya	200 orang	400	300	-		400	200,00
0	0	3	13	Pemantauan disiplin PNS	Hasil pemantauan disiplin PNS	42 dokumen	3	1	1	20 %	24	57,14
0	0	3	14	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Jumlah penanganan kasus-kasus kepegawaian yang terselesaikan	190 orang	171	60	48	80 %	299	157,37
0	0	3	16	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti konseling psikologi	750 orang	330	48	-	75 orang	405	54,00
0	0	3	37	Konsultasi dan Bantuan Hukum	Jumlah PNS yang diberikan konsultasi dan bantuan hukum	50 orang	0	21	9		9	18,00
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	10,33		14,09		74,29	74,29
0	0	5	26	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	91 orang	47	44	31	78 orang	156	171,43
0	0	5		Pornas KORPRI	Jumlah orang yang mengikuti Pornas KORPRI	0 0	0			32 orang	32	100,00
0	0	5		Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	0 0	0			16 orang	16	100,00
3				PENUNJANG URUSAN		0	0					
3	3			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		0	0					
3	3	15		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan	50 Orang	31,23		49,03		61,22	61,22
300	3	15	8	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	176 orang	80	41	37	39 orang	156	88,64
300	3	15	9	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	6 orang	3	1	-	1 orang	4	66,67
300	3	15	10	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	39 orang	19	6	4	3 orang	26	66,67

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
300	3	15	16	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan	284 orang	34	17	15	190 orang	239	84,15
300	3	15	17	Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar Luar Negeri	12 orang	0	6	-		-	0,00
3	3	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara	100%	42,12		96,00		81,63	81,63
300	3	16	30	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah dewan pengurus KOPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi	286 orang	143	143	143		286	100,00
300	3	16	61	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	65 orang	77	25	46	22 orang	145	223,08
300	3	16	72	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	3.000 orang	1	1	1	1 kegiatan	3	0,10
300	3	16	73	Persemayaman dan Pemakaman Angta KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	30 kali	0	20	-	1 kegiatan	1	3,33
3	3	17		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	91,74		100,27		9.199	9198,74
300	3	17	31	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencanakarya Satya	294 orang	1.503	500	498	1.000 orang	3.001	1020,75
300	3	17	35	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspem PNS se Provinsi Riau	Hasil monitroing PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	4 dokumen	3	1	1	500 orang	504	12600,00
300	3	17	47	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	Jumlah Pegawai Negeri sipik BKD yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK	109 orang	87	7	7	26 orang	120	110,09
300	3	17	56	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti	55 orang	0	20	3		3	5,45
300	3	17	57	Monitoring IPDN	Hasil Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN	5 dokumen	3	1	1		4	80,00
300	3	17	60	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Hasil monitoring dan evaluasi jabatan fungsional PNS Provinsi Riau	5 dokumen	2	1	1		3	60,00
300	3	17	66	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Hasil data SKP Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota yang di monitoring	5 dokumen	3	1	1	16.737 orang	16.741	334820,00
300	3	17	68	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada	1.086 orang	538	250	324	250 orang	1.112	102,39

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
300	3	17	70	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Pegawai negeri sipil yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1.640 orang	1.130	380	459	200 orang	1.789	109,09
300	3	17	75	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah dokumen yang terpelihara	13.000 dokumen	3.988	7.000	5.507	7.000 dokumen	16.495	126,88
300	3	17		Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Terdata					4 dokumen	4	100,00
300	3	17	98	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	600 orang	1	1	-		1	0,17
300	3	17	100	MTQ Nasional KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dikirim mengikuti MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional korpri	130 orang	0	130	120		120	92,31
300	3	17	109	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota	4 dokumen	2	1	1	1 dokumen	4	100,00
300	3	17	114	Pengembangan E-vernment Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinis Riau	15 Aplikasi	1	1	1	1 sistem	3	20,00
300	3	17		Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah pejabat Provinsi Riau yang mengikuti seleksi jabatan tinggi					34 JPT	34	100,00
300	3	17	116	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Administrasi yang terseleksi melalui uji kompetensi untuk dipetakan sesuai jabatannya	2.240 orang	0	960	-		-	0,00
300	3	17	117	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau yang tersusun	26 dokumen	1	1	1	1.200 jabatan	1.202	4623,08
300	3	17	120	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah JPT yang di monitoring dan dilaksanakan di 12 Kabupaten Kota	1.080 orang	1	1	1		2	0,19
300	3	17	127	Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau	Hasil monitroing dan pendampingan Kenaikan Pangkat Kabupaten/kota	1 Dokumen	0	1	1		1	100,00
3	3	18		Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan						-	0,00
300	3	18	1	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan pindah tugas PNS yang terkelola	1.100 orang	19.440	3.000	5.754	1.500 orang	26.694	2426,73
300	3	18	2	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun PNS yang terselesaikan	500 SK	404	400	600	500 orang	1.504	300,80
300	3	18	6	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	16.460 orang	5.950	4.000	5.882	4.000 orang	15.832	96,18
300	3	18	8	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemda Provinsi Riau yang terkelola	11.890 SK	4.255	2.000	1.564	1.100 orang	6.919	58,19

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
300	3	18	9	Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik BKD Provinsi Riau	450 Dokumen	0	1	1	1 Dokumen	2	0,44
300	3	18	11	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.160 berkas	5.042	300	687	350 berkas administrasi kepegawaian	6.079	524,05
300	3	18	13	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang disusun untuk diusulkan	1.336 Formasi PNS	61	1	1	250 formasi PNS	312	23,35
300	3	18	17	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang ditempatkan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	7.095 Orang	1.531	500	1.429	500 orang	3.460	48,77
300	3	18	20	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau	Jumlah jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan provinsi riau yang di ambil sumpah dan pelantikan	4.095 orang	2.331	500	1.138		3.469	84,71
300	3	18	23	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	300 SK	58	50	-	50 orang	108	36,00
300	3	18	25	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Propinsi Riau	Jumlah Dokumen Verifikasi usulan kenaikan pangkat	8.000 berkas	0	4.000	5.882	4.000 berkas	9.882	123,53
300	3	18	26	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	jumlah PNS yang mengusulkan usulan gelar	100 orang	0	50	109	50 orang	159	159,00
300	3	18	27	Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	Rentang waktu pengelolaan humas BKD	4 Tahun	1	12	12		13	325,00
300	3	18	28	Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau	Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun	273 berita	0	1	1		1	0,37
300	3	18	29	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan	1 Aplikasi	0	1	1	1 Aplikasi	2	200,00
3	3	19		Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarium dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti	0	0				-	0,00
300	3	19	2	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	400 Orang	240	80	80	100 orang	420	105,00
300	3	19	6	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah berkas SKP Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi	24.554 Berkas	0	16.800	16.800		16.800	68,42

2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan

- 1) Adanya rasionalisasi anggaran;
- 2) Adanya kegiatan yang tidak dijalankan karena kebijakan daerah;
- 3) Adanya perubahan target kinerja terhadap kegiatan

b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan.

- 1) Konsistensi pelaksanaan kegiatan;
- 2) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan.

2.1.2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

2.1.3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Melakukan Efisiensi terhadap anggaran;
- c. Penetapan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas tolak ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah dengan melalui pembinaan dan pengembangan ASN dan peningkatan manajemen pelayanan ASN.

Indikator kinerja yang digunakan antara lain :

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; dan
- b. Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik;

Dari Indikator Kinerja tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui

pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita- citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM	IKK	Target RENSTRA-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR SASARAN RENSTRA 2017-2018											
	1. Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya			2%	2%			2,55%	0,56%			
	2. Presentase Penetapan ASN dalam jabatan			10%	10%			64,58%	7,28%			
	3. Persentase menurunnya angka pelanggaran disiplin			40%	40%			32,93%	28,08%			
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			B	B	-		B	B			

	INDIKATOR SASARAN RENSTRA 2019-2024					65%	65%			65%	65%	
	5. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					75%	85%			75%	85%	

Renstra Tahun 2018-2021

Sumber Data : Laporan Tahunan Badan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diuraikan menurut indikator kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis dan evaluasi ini menunjukkan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Tabel Kriteria Capaian

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Dari uraian sebagaimana tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Renstra Tahun 2018-2021 diatas, maka gambaran evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator sasaran berdasarkan Renstra setelah revisi (2017-2018)

a. Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya

Untuk indikator ini, dapat dikatakan capaian kinerjanya sudah sangat baik . Hal ini ditunjukkan dengan jumlah realisasi melebihi dari jumlah target yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasinya sebesar 2,87 %. Sedangkan target yang telah ditetapkan hanya sebesar 2 %. Sehingga rasio dari capaian kinerjanya juga melebihi dari 100 %, yaitu menjadi sebesar 143,5 %.

b. Persentase Penetapan ASN dalam jabatan

Selanjutnya untuk indikator ini, capaian kinerjanya juga dikatakan

sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 10 % dapat direalisasikan menjadi 54,55 %. Tentu saja hal ini menunjukkan rasio capaian yang sangat besar, yaitu menjadi 545,5%.

c. Persentase menurunnya angka pelanggaran disiplin

Demikian juga halnya dengan indikator ini, capaian kinerjanya juga dikatakan sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 40 % dapat direalisasikan menjadi 238 %. Tentu saja hal ini menunjukkan rasio capaian yang sangat besar, yaitu menjadi 595 %.

d. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dan untuk indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan selarasnya target dan realisasinya. Dimana target yang ditetapkan dengan nilai B dan realisasi yang tercapai juga menunjukkan nilai B.

Pada kurun waktu tahun 2017 (setelah dilakukan revisi terhadap renstra), grafik dari persentase capaian kinerja badan kepegawaian daerah provinsi riau sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang telah diuraikan sebagaimana diatas.

Pergerakan yang cukup signifikan ini merupakan efek langsung dari adanya implikasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dengan adanya pelaksanaan konkuren, mengakibatkan jumlah pegawai negeri sipil yang ada di provinsi riau meningkat, dari yang sebelumnya berjumlah 7 ribu mengalami peningkatan menjadi 16 ribu orang.

Tentu saja dengan adanya penambahan dari jumlah pns yang ada di pemerintah provinsi ini membentuk kurva linear terhadap peningkatan jumlah pelayanan yang ada di BKD Provinsi Riau. Sehingga secara otomatis pada tahun 2017 capaian kinerja BKD provinsi riau juga meningkat secara drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Prestasi BKD provinsi riau sampai dengan 2018

Selanjutnya selama selang waktu 5 tahun (2014-2018) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggap merupakan kegiatan pelayanan baru dan berhasil dilaksanakan . Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Assessment center

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau untuk pertama kali membentuk UPT. Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai sebagai unit yang bertugas dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.

Pada tahun 2017, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dibentuk UPT. Penilaian Kompetensi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

UPT. Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian Daerah di bidang penilaian kompetensi.

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Riau menerapkan sistem Merit.

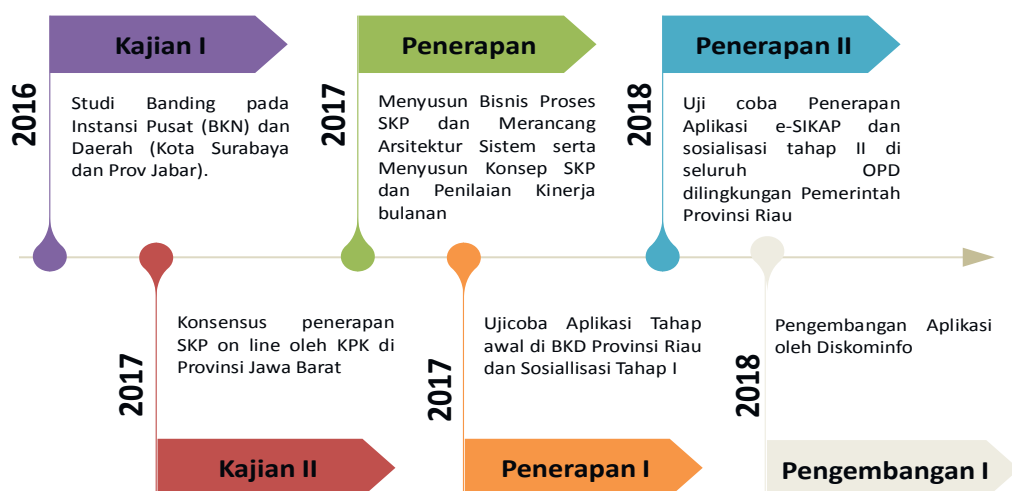
Adapun pelaksanaan assesmen yang sudah dilakukan oleh UPT
Penilaian Kompetensi :

No	Kegiatan	Waktu	Jumlah Peserta	Tempat Pelaksanaan
1.	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	29 Agustus – 02 Desember 2016	1255 orang	Pekanbaru
2.	Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Riau	09-11 Mei 2016	19 orang	Pekanbaru
3.	Seleksi Terbuka JPTP Provinsi Riau	08-11 Maret 2017	72 orang	Pekanbaru
4.	Evaluasi JPTP Provinsi Riau	07-08 Juli 2017	22 orang	Pekanbaru
5.	Seleksi Terbuka JPTP Provinsi Riau	28-30 Agustus 2017	31 orang	Pekanbaru
6.	Job Fit JPTP Kab. Bengkalis	20-21 April 2017	27 orang	Bengkalis
7.	Seleksi Terbuka JPTP Kab. Bengkalis	22-24 November 2017	30 orang	Bengkalis
8.	Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah dan JPTP Kab. Indragiri Hilir	05-06 November 2015	121 orang	Tembilahan
9.	Job Fit JPTP Kab. Indragiri Hulu	14-16 Desember 2016	27 orang	Rengat
10.	Seleksi Terbuka JPTP Kab. Indragiri Hulu	06-09 Agustus 2017	25 orang	Rengat
11.	Seleksi Terbuka JPTP Sekretaris Daerah Kab. Kampar	06-08 September 2017	6 orang	Pekanbaru
12.	Seleksi Terbuka JPTP Kab. Kampar	16-18 November 2017	26 orang	Pekanbaru
13.	Evaluasi JPTP Kab. Kampar	19-21 Desember 2017	26 orang	Pekanbaru
14.	Seleksi Terbuka JPTP Kab. Kuantan Singingi	09-12 Agustus 2017	74 orang	Taluk Kuantan
15.	Evaluasi JPTP Kab. Kuantan Singingi	19-20 Februari 2018	16 orang	Taluk Kuantan
16.	Seleksi Terbuka JPTP Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir	01-02 November 2016	5 orang	Bagansiapiap
17.	Seleksi Terbuka JPTP Kab. Rokan Hilir	04-12 Mei 2017	41 orang	Bagansiapiapi
18.	Evaluasi JPTP Kab. Rokan Hulu	16-19 Juli 2017	20 orang	Pasir Pengaraian
19.	Seleksi Terbuka JPTP Kab. Rokan Hulu	03-08 September 2017	73 orang	Pasir Pengaraian
20.	Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris	09-11 Mei 2016	19 orang	Pekanbaru

	Daerah Provinsi Riau			
21.	Seleksi Terbuka JPTP Sekretaris Daerah Kota Dumai	10-11 Januari 2017	6 orang	Dumai
22.	Seleksi Terbuka dan Job Fit JPTP Kota Dumai	28 Februari – 03 Maret 2017	74 orang	Dumai
23.	Seleksi Terbuka JPTP Kota Dumai	03-05 Desember 2017	13 orang	Dumai

2. SKP Online

Timeline Diagram



3. Kelas jabatan

Provinsi Riau pada tahun 2017 telah menyusun jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Kanreg XII dan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Povinsi Riau.

4. Smart Office

Pada Tahun 2015 SIMPEG diintegrasikan dengan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau frontoffice dan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) melalui beberapa perubahan baik pada aplikasi maupun melauai pemutakhiran hardware/teknologi, dengan nama Sistem Manajemen Aparatur Responsif Terpadu (SMART).

SMART merupakan Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian yang diintegrasikan dengan tatakelola pelayanan kepegawaian satu pintu berbasis komputer dalam bentuk web service, untuk menunjang proses manajemen, pengendalian administrasi, pelayanan kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik/responsive dan transparan.

Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Menghasilkan informasi data kepegawaian untuk membantu pimpinan dalam merencanakan formasi, pengadaan, penerimaan, merencanakan mutasi, promosi/demosi, penyebaran pegawai dan merencanakan pelatihan pegawai di masa yang akan datang,
2. Menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai,
3. Membantu kelancaran administrasi, manajemen kepegawaian dan penggajian serta meningkatkan kinerja pelayanan terhadap pegawai,
4. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin/berkala dan dalam pembuatan laporan.

5. Pelayanan satu pintu

Pada tahun 2016 BKD Provinsi Riau mendirikan pelayanan satu pintu melalui front office dengan 5 pelayanan :

1. Tata usaha dan tamu pimpinan;
2. Administrasi kepegawaian yang terdiri dari pelayanan :
 - a. Kartu Pegawai,
 - b. Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Pegawai Elektronik,
 - c. Cuti PNS,
 - d. Pensiun,
 - e. Ujian Dinas,
 - f. Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah.
3. Mutasi Wilayah Kerja, Kepangkatan dan Jabatan Fungsional
4. Izin Belajar, Tugas Belajar dan Diklat Pegawai

5. Satya Lencana, Tabungan Perumahan dan Permasalahan PNS Seperti Hukum, Disiplin dan Rumah Tangga.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga pembina dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara. Terdapat 4 (empat) kementerian/ lembaga yang memiliki keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* “Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi” dan *misi* “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka

- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*);
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil;

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu program pembinaan dan pengembangan aparatur, dan program pelayanan administrasi aparatur sipil negara

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah “menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025” . Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;
- b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi manajemen kepegawaian;
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem manajemen internal BKN.

Badan kepegawaian Negara Tahun 2015-2019 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Paradigma PNS sebagai aset, bukan expenses dan pelayanan masyarakat sebagai return (*value addedd to consumers*);
- b. Mengelola Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif;
- c. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan unit kepegawaian di setiap K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Penerapan pengendalian pegawai ASN yang bersifat pencegahan (preventive) baik dalam penempatan pejabat ASN maupun dalam penegakan disiplin ;
- e. Pengintegrasian kinerja dengan kompensasi bagi pegawai ASN;
- f. Pendataan pegawai ASN secara handal dan terkini;
- g. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program pembinaan dan pengembangan aparatur, dan program pelayanan administrasi aparatur sipil negara.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang

baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

4. Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara yang disingkat KASN merupakan lembaga independen yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Visi yang ingin diwujudkan KASN adalah “Menjadi lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta sistem merit yang terpercaya dan berwibawa di Asia guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara profesional yang berkinerja tinggi, berintegritas dan netral”. Sedangkan misi adalah :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit dan nilai dasar kode etik serta kode perilaku pegawai pada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah secara objektif, independen dan profesional; dan
2. Menjaga netralitas pegawai ASN dan pelaksanaan fungsi ASN

sebagai pemersatu bangsa.

Sesuai dengan visi, misi KASN untuk menjamin terwujudnya birokrasi Indonesia yang berdasarkan Sistem Merit, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Membangun kesadaran dan pemahaman serta kepatuhan terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
2. Menerapkan pengawasan yang efektif dan komperhensif terhadap pelaksanaan nilai dasar, kode etik danb kode perilaku;
3. Melakukan penanganan pengaduan secara cepat, tepat dan tuntas;
4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase secara adil, transparan dan menyeluruh;
5. Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka penyempurnaan manajemen ASN;dan
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KASN.

Untuk melaksanakan arah kebijakan ini, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Melaksanakan promosi dan advokasi implementasi sistem merit dan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku;
2. Memprioritaskan pengawasan dan pemantauan pengisian JPT melalui seleksi terbuka diK/L dan Pemda;
3. Memprioritaskan penanganan pengaduan dan penyelidikan untuk kasus yang berdampak luas;
4. Membangun kerjasama lintas instansi terkait (BKN, Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan & RB, APSC);
5. Melakukan mediasi untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi;dan
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas implemtasi manajemen ASN

Dengan mengacu pada rencana strategis KASN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dan program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan sistem merit yang ditetapkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara

Adapun permasalahan dan penghambat pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau saat ini adalah rendahnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme ASN, dimana berbagai faktor ini saling berkaitan yaitu:

1. Belum optimalnya manajemen pelayanan ASN
2. Belum optimalnya pembinaan ASN

Faktor-faktor penghambat :

Belum optimalnya impelentasi pelaksanaan penerapan Sistem Merit terkait manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari

1. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan;
2. Belum adanya kesesuaian antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan;
3. Belum optimalnya promosi, mutasi, dan rotasi;
4. Belum optimalnya sistem pendukung;
5. Belum optimalnya perlindungan dan pemberi kemudahan;
6. Belum optimalnya manajemen kinerja;
7. Belum optimalnya pembinaan karir dan peningkatan kompetensi; dan
8. Belum optimalnya penggajian, penghargaan dan disiplin.

Dari uraian permasalahan diatas yang menjadi permasalahan pokok terkait Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau masih kurang optimalnya implementasi terhadap pelaksanaan sistem merit sehingga menyebabkan **“Rendahnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”** hal ini berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pelayanan publik sehingga berdampak kepada pencapaian misi Gubernur Riau ke 5 (lima), yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Adapun tantangan dan peluang bagi pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau yang Profesionalisme adalah sebagai berikut :

Tantangan yang dihadapi :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja
2. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan
3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka
4. Memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan pengembangan pola karier dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta
5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan
6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
7. Menrencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja
8. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang
9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN

Dan yang menjadi peluang kedepannya :

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pemberlakuan Permempan Nomor 40 tahun 2018 tentang Sistem Merit.
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Pelaksanaan KORPSUGAH KPK melalui PP Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi pencegahan korupsi.

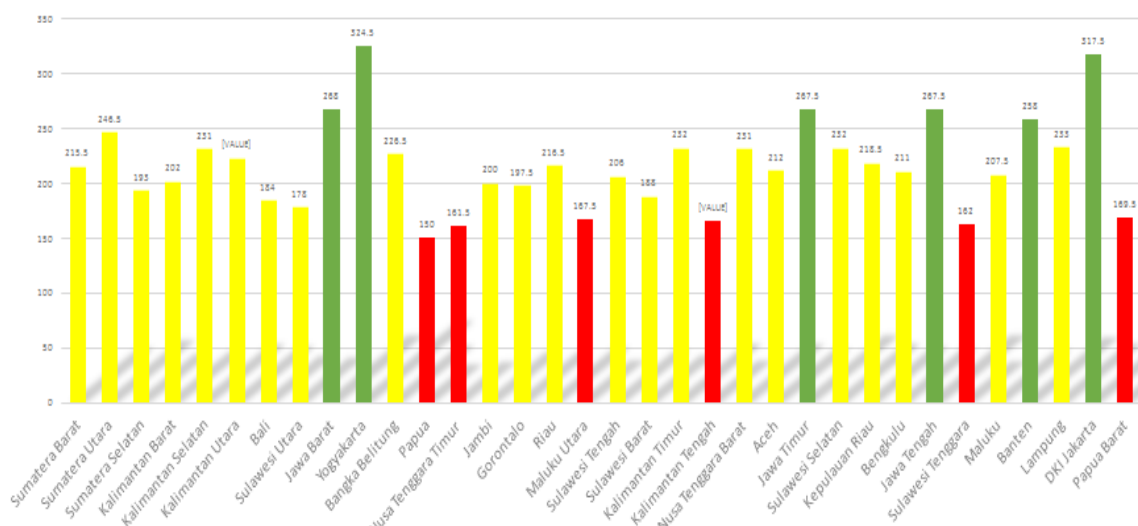
Rumusan terhadap Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Riau yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah **“Rendahnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”** dengan ini terdapat beberapa cacatan strategis dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Tahun 2020

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, mengamanatkan kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya memuat aksi pencegahan korupsi dengan fokus dan sasaran pada (1) perizinan dan tata niaga, (2) keuangan negara, dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Arah kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi, perlu direspon oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, terkait fokus ketiga (3) yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi, dengan mengimplementasikan sistem merit kedalam Rencana Kerja Provinsi Riau Tahun 2020.

Pranata lain yang mendukung mewajibkan implementasi sistem merit kedalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 adalah Surat Edaran Menteri dalam Negeri tentang Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Tahun 2019-2020, point 5 huruf b "Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk mengalokasikan pemenuhan anggaran kegiatan Aksi PK dan Aksi Korsupgah kedalam APBD 2019 dan 2020".

Pemerintah Provinsi Riau, menurut KASN saat ini berada diposisi level 2 (dua) untuk Sistem Merit tingkat provinsi di Indonesia, hal ini mendorong Badan Kepegawaian Daerah selaku pemegang mandat KASN di daerah, berusaha meningkatkan level Sistem Merit dan dapat menduduki posisi level 3 (tiga) dimasa mendatang. Selanjut dapat dilihat pada gambar 2.



Komitmen Badan Kepegawaian Daerah untuk mengimplementasikan sistem merit dalam Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai program strategis nasional, juga didukung oleh Tindak Lanjut Rencana Aksi Korsupgah KPK RI tahun 2017, dan tahun 2018, yang merekomendasikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penguatan implementasi sistem merit dan *talent pool* di Provinsi Riau.

Implementasi sistem merit dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang tangguh, professional dan handal, dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk Rencana Strategi 5 (lima) tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Profesionalisme ASN”**

Adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan mewujudkan aparatur sipil negara yang tangguh, professional dan handal adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Manajemen Pelayanan ASN;
2. Optimalisasi Pembinaan ASN.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan;
2. Kesesuaian Pengadaan Pegawai;
3. Optimalisasi Promosi, Mutasi dan Rotasi ;
4. Optimalisasi Sistem Pendukung;
5. Optimalisasi Pemberian Perlindungan dan Kemudahan;
6. Optimalisasi Manajemen Kinerja;
7. Optimalisasi Pembinaan Karier dan Peningkatan Kompetensi;
8. Optimalisasi Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.

Sedangkan untuk mendukung pencapaian strategi, ditetapkan kebijakan yang menyeluruh, terukur, realistis, dan melayani, sebagai berikut :

Strategi 1 : Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan

Kebijakan :

- a. Ketersediaan rencana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk jangka menengah (5 tahun);
- b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time;
- c. Ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun).

Strategi 2 : Kesesuaian Pengadaan Pegawai

Kebijakan :

- a. Ketersediaan kebijakan internal Pergub terkait pengadaan ASN;
- b. Optimalisasi penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;
- c. Pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK/pengalihan PNS dari instansi lain pada tahun terakhir dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
- d. Optimalisasi penempatan PNS yang sesuai jabatan yang dilamar.

Strategi 3 : Optimalisasi Promosi, Mutasi dan Rotasi

Kebijakan :

- a. Adanya Kebijakan internal Pergub tentang pola karier;
- b. Adanya Kebijakan internal Pergub tentang mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu kepada rencana suksesi;
- c. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

Strategi 4 : Optimalisasi Sistem Pendukung

Kebijakan :

- a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.
- b. Optimalisais Penguatan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan

Strategi 5 : Optimalisasi Pemberian Perlindungan Dan Kemudahan

Kebijakan :

- a. Adanya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap

perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun

b. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Strategi 6 : Optimalisasi Manajemen Kinerja.

Kebijakan :

- a. Adanya kebijakan penggunaan hasil penilaian kinerja bagi penentuan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi, rotasi, diklat)
- b. Penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur
- c. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
- d. Adanya analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya

Strategi 7 : Optimalisasi Pembinaan Karier dan Peningkatan Kompetensi

Kebijakan :

- a. Menyusun standar kompetensi manajerial, bidang, dan sosio kultural untuk setiap jabatan
- b. Menyusun profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi
- c. Membangun talent pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir Menyusun analisis tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai
- d. Memetakan kesenjangan kinerja ASN dan rencana pengembangan dan pembinaan
- e. Menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN
- f. Menyelenggarakan Diklat yang dalam rangka mengatasi kesenjangan
- g. Meningkatkan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai meningkatkan kompetensi melalui *coaching*, *counseling* dan *mentoring*

Strategi 8 : Optimalisasi Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Kebijakan :

- a. Peningkatan penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya
- b. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

- a. Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat beberapa kegiatan baru;
- b. Terdapat perubahan anggaran pada beberapa program dikarenakan evaluasi dari beberapa kegiatan untuk efisien, efektif dan akuntabel, yang dari anggaran pada Rancangan Awal RKPD Rp. 16.546.356.252 menjadi Rp. 16.065.525.144 dimana perubahan terjadi pada program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara yang semula Rp. 4.060.281.500 menjadi Rp. 3.691.466.822, dan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dari semula Rp. 5.729.485.552 menjadi Rp. 5.617.469.122.

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Riau

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.716.589.200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.716.589.200	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	2.500 surat	13.940.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	2.500 surat	13.940.250	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Rekening Yang Dibayar	24 rekening	1.000.810.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Rekening Yang Dibayar	24 rekening	1.000.810.000	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	200.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	200.000.000	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	750.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	750.000.000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	170.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	170.000.000	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	20 jenis	135.866.900	Penyediaan alat tulis kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	20 jenis	135.866.900	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicetak dan Digandakan	25 jenis	118.513.250	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicetak dan Digandakan	25 jenis	118.513.250	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 jenis	70.691.800	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 jenis	70.691.800	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Pekanbaru	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	6.400 porsi	165.015.000	Penyediaan makanan dan minuman	Pekanbaru	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	6.400 porsi	165.015.000	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah dan kab/kota	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	130 kali	800.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah dan kab/kota	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	130 kali	800.000.000	
12	Penyedia Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Yang Disediakan	2.220 OB	1.500.000.000	Penyedia Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Yang Disediakan	2.220 OB	1.500.000.000	
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 OB	791.752.000	Penyediaan jasa keamanan kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 OB	791.752.000	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	800.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	800.000.000	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 ruang	600.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 ruang	600.000.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 unit	200.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 unit	200.000.000	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Presentase Tingkat Kehadiran	100%	240.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Presentase Tingkat Kehadiran	100%	240.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135 stell	120.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135 stell	120.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Hari Tertentu	Pekanbaru	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	135 stell	120.000.000	Pengadaan Pakaian Hari Tertentu	Pekanbaru	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	135 stell	120.000.000	
15	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100%	4.060.281.500	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100%	3.691.466.822	
1	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	2 dokumen	174.795.400	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	2 dokumen	126.166.733	
2	Pengelolaan data kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2.500 Data elektronik	135.486.100	Pengelolaan data kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2.500 Data elektronik	80.756.100	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
3	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	Jumlah ASN yang direkrut	350 orang	250.000.000	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	Jumlah ASN yang direkrut	350 orang	250.000.000	
4	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Luar daerah	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	126 Orang	250.000.000	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Luar daerah	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	126 Orang	250.000.000	
5	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Pekanbaru dan Kab/Kota	Jumlah ASN yang difasilitasi	200 orang	100.000.000	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Pekanbaru dan Kab/Kota	Jumlah ASN yang difasilitasi	200 orang	79.700.980	
7	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Pekanbaru	Jumlah dokumen penataan PNS	1 Dokumen	350.000.000	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Pekanbaru	Jumlah dokumen penataan PNS	1 Dokumen	307.591.507	
8	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	1 Dokumen	160.628.502	
9	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	
10	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	400.000.000	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	350.000.000	
11	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Pekanbaru dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1 dokumen	200.000.000	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Pekanbaru dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1 dokumen	200.000.000	
12	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	2 modul	200.000.000	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	2 modul	200.000.000	
13	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	1 modul	130.000.000	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	1 modul	101.766.000	
15	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Pekanbaru	Jumlah sertifikat akreditasi UPT Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	1 sertifikat akreditasi	100.000.000	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Pekanbaru	Jumlah sertifikat akreditasi UPT Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	1 sertifikat akreditasi	100.000.000	
16	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaianya	350 orang	150.000.000	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaianya	350 orang	150.000.000	
17	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4.000 berkas	700.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4.000 berkas	624.555.000	
18	Pengelolaan pensiun PNS	Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 org	300.000.000	Pengelolaan pensiun PNS	Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 org	300.000.000	
19	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1.000 orang	100.000.000	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1.000 orang	90.302.000	
20	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 dokumen	70.000.000	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 dokumen	70.000.000	
21	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Pekanbaru	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 kasus	200.000.000	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Pekanbaru	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 kasus	200.000.000	
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Presentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	5.729.485.552	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Presentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	5.617.469.122	
1	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah dokumen	2 dokumen	70.000.000	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah dokumen	2 dokumen	70.000.000	
2	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	100.000.000	
3	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2 dokumen	150.000.000	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2 dokumen	150.000.000	
4	Pemberian beasiswa tugas belajar	Luar Daerah	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	33 orang	3.400.000.000	Pemberian beasiswa tugas belajar	Luar Daerah	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	33 orang	3.400.000.000	
5	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 orang	81.483.600	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 orang	81.483.600	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
6	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	4 orang	200.000.000	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	4 orang	200.000.000	
7	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional	10 Orang	200.000.000	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional	10 Orang	200.000.000	
8	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	10 Orang	200.000.000	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	10 Orang	200.000.000	
9	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Pekanbaru dan Luar Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	20 Orang	246.808.000	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Pekanbaru dan Luar Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	20 Orang	246.808.000	
10	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Luar Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	5 Orang	200.000.000	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Luar Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	5 Orang	200.000.000	
11	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah ASN yang dikonseling	42 orang	124.110.852	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah ASN yang dikonseling	42 orang	94.428.422	
12	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Pekanbaru dan Kab/Kota	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 kali	157.083.100	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Pekanbaru dan Kab/Kota	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 kali	107.135.100	
13	Pembangunan database terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN	Pekanbaru	Jumlah data base yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	1 data base	100.000.000	Pembangunan database terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN	Pekanbaru	Jumlah data base yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	1 data base	67.614.000	
14	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Luar daerah	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	5 Orang	400.000.000	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Luar daerah	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	5 Orang	400.000.000	
15	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Pekanbaru, Kabupaten/ kota dan Luar Daerah	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5 agenda	100.000.000	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Pekanbaru, Kabupaten/ kota dan Luar Daerah	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5 agenda	100.000.000	
					16.546.356.252						16.065.525.144

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah, Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2019-2024, mencerminkan bagian integral dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Disisi lainya Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2019-2024, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) kementerian/kelembagaan yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani” dan *misi* “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil;

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu program pembinaan dan pengembangan aparatur, dan program pelayanan administrasi aparatur sipil negara

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah “menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program pembinaan dan pengembangan aparatur, dan program pelayanan administrasi aparatur sipil negara

3. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan dasar utama KASN mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah yang dilatar belakangi oleh hal sebagai berikut:

- a. Efektivitas pemerintahan yang kurang mendukung;
- b. Reformasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, bersih dan akuntabel, serta melayani
- c. Perubahan manajemen ASN sebagai upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Implementasi sistem Merit merupakan salah satu dari usulan output prioritas RKP KASN 2020, dimasa mendatang sistem Merit dilakukan secara komprehensif di Indonesia, sehingga pemerintah provinsi Riau wajib mengakomodir pelaksanaan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Surat edaran tentang Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Tahun 2019 – 2020, menindak - lanjuti pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden tahun 2018, tentang Strategi Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang ditetapkan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (timnas PK), yang terdiri dari :

- a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Menteri Dalam Negeri
- d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- e. Kepala Staf Kepresidenan

Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020 terdiri dari 3 fokus dan 11 aksi. Pada fokus ke 3 (tiga) adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kriteria keberhasilan percepatan pelaksanaan sistem merit. Kebijakan nasional sistem merit merupakan

salah satu fokus dari rencana aksi KPK, untuk penguatan reformasi birokrasi dan aksi pencegahan korupsi pemerintahan daerah.

Mengingat pentingnya sistem merit sebagai Kebijakan nasional dan rencana aksi KPK Tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Riau merespon kebijakan dimaksud pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan yang akan disusun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai rencana kerja pembangunan daerah melalui Visi dan Misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran ini juga memuat langkah-langkah strategi dan kebijakan yang diturunkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam melakukan manajemen pelayanan administrasi kepegawaian, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparansi, dan akuntabel demi terwujudnya reformasi birokrasi yang di cita-citakan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memperhatikan isu-isu yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta merumuskan permasalahan-permasalahan terkait menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Dalam menjalankan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun

2019-2024, dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diberikan tanggung jawab pada misi yang ke 5 (lima) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”***. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu ***“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”***. .

Untuk pencapaian visi tersebut diturunkan melalui misi Gubernur yang kelima yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”***. Dari visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kinerja asn dan pelayanan publik melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tersebut dijabarkan menjadi tujuan organisasi perangkat daerah adalah terwujudnya profesionalitas ASN di Provinsi Riau dengan sasaran:

1. optimalisasi manajemen pelayanan asn
2. optimalisasi pembinaan asn

3.3. Program dan Kegiatan

Renja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Program tsb yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2020, sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.0.03.01.0.03	KEPEGAWAIAN. PEDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	5.716.589.200	APBD Provinsi Riau		100%	7.151.918.400
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2.500 surat	13.940.250		Pekanbaru	2.500 surat	23.514.000
3.0.03.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	Pekanbaru	24 rekening	1.000.810.000		Pekanbaru	24 rekening	1.334.823.600
3.0.03.01.0.0.00.01.003	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pekanbaru	10 Unit	200.000.000		Pekanbaru	80 Unit	500.000.000
3.0.03.01.0.0.00.01.004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	12 bulan	750.000.000		Pekanbaru	12 bulan	926.158.200
3.0.03.01.0.0.00.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pekanbaru	14 Unit	170.000.000		Pekanbaru	14 Unit	243.516.800
3.0.03.01.0.0.00.01.007	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	Pekanbaru	20 jenis	135.866.900		Pekanbaru	25 jenis	149.454.400
3.0.03.01.0.0.00.01.008	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan	Pekanbaru	25 jenis	118.513.250		Pekanbaru	30 jenis	130.366.900
3.0.03.01.0.0.00.01.009	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pekanbaru	31 jenis	70.691.800		Pekanbaru	31 jenis	99.861.000
3.0.03.01.0.0.00.01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Pekanbaru	6.400 porsi	165.015.000		Pekanbaru	6.400 porsi	181.500.000
3.0.03.01.0.0.00.01.011	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar daerah dan kab/kota	130 kali	800.000.000		Luar daerah dan kab/kota	160 kali	1.089.413.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.0.03.01.0.0.00.01.012	Penyedia Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Yang Disediakan	Pekanbaru	2.220 OB	1.500.000.000		Pekanbaru	2.220 OB	1.500.000.000
3.0.03.01.0.0.00.01.013	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Pekanbaru	276 OB	791.752.000		Pekanbaru	276 OB	973.309.700
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	800.000.000			100%	766.200.000
3.0.03.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	2 ruang	600.000.000		Pekanbaru	2 ruang	500.000.000
3.0.03.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	300 unit	200.000.000		Pekanbaru	300 unit	266.200.000
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Tingkat Kehadiran ASN		100%	240.000.000			100%	120.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	135 stell	120.000.000			135 stell	120.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.003	Pengadaan Pakaian Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Pekanbaru	135 stell	120.000.000			0	-
3.0.03.01.0.0.00.15.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan		100%	3.691.466.822			100%	7.931.987.100
3.0.03.01.0.0.00.15.001	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah Dokumen	Pekanbaru	2 dokumen	126.166.733		Pekanbaru	1 dokumen	203.274.900
3.0.03.01.0.0.00.15.002	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	Pekanbaru	2.500 Data elektronik	80.756.100		Pekanbaru	2.500 Data elektronik	285.748.700
3.0.03.01.0.0.00.15.003	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	Pekanbaru	350 orang	250.000.000		Pekanbaru	350 orang	871.503.900
3.0.03.01.0.0.00.15.004	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	Luar daerah	126 Orang	250.000.000		Luar daerah	126 Orang	396.924.100
3.0.03.01.0.0.00.15.005	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Pekanbaru dan Kab/Kota	200 orang	79.700.980		Pekanbaru dan Kab/Kota	198 orang	180.000.000
3.0.03.01.0.0.00.15.007	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan PNS	Pekanbaru	1 Dokumen	307.591.507		Pekanbaru	1 Dokumen	424.773.800
3.0.03.01.0.0.00.15.008	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	Pekanbaru	1 Dokumen	160.628.502		Pekanbaru	1 Dokumen	405.080.900
3.0.03.01.0.0.00.15.009	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	Pekanbaru	1 Dokumen	50.000.000		Pekanbaru	1 Dokumen	150.000.000
3.0.03.01.0.0.00.15.010	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	Pekanbaru	2 Dokumen	350.000.000		Pekanbaru	2 Dokumen	930.438.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.0.03.01.0.0.00.15.011	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Pekanbaru dan Kab/Kota	1 dokumen	200.000.000		Pekanbaru dan Kab/Kota	1 dokumen	684.720.000
3.0.03.01.0.0.00.15.012	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	Pekanbaru	2 modul	200.000.000		Pekanbaru	2 modul	521.391.900
3.0.03.01.0.0.00.15.013	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	Pekanbaru	1 modul	101.766.000		Pekanbaru	1 modul	313.909.400
3.0.03.01.0.0.00.15.015	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah sertifikat akreditasi UPT Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	Pekanbaru	1 sertifikat akreditasi	100.000.000		Pekanbaru		
3.0.03.01.0.0.00.15.016	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	Pekanbaru	350 orang	150.000.000		Pekanbaru	350 orang	290.741.000
3.0.03.01.0.0.00.15.017	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola	Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	4.000 berkas	624.555.000		Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	4.000 berkas	1.017.000.000
3.0.03.01.0.0.00.15.018	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	600 org	300.000.000		Pekanbaru, Kab/Kota dan Luar Daerah	600 org	498.794.800
3.0.03.01.0.0.00.15.019	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	1.000 orang	90.302.000		Pekanbaru	1.000 orang	192.544.000
3.0.03.01.0.0.00.15.020	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	Pekanbaru	359 dokumen	70.000.000		Pekanbaru	359 dokumen	150.000.000
3.0.03.01.0.0.00.15.021	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	Pekanbaru	70 kasus	200.000.000		Pekanbaru	70 kasus	415.141.400
3.0.03.01.0.0.00.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100%	5.617.469.122				16.871.490.200
3.0.03.01.0.0.00.17.001	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	Pekanbaru	2 dokumen	70.000.000		Pekanbaru	2 dokumen	150.000.000
3.0.03.01.0.0.00.17.002	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	Pekanbaru	1 Dokumen	100.000.000		Pekanbaru	1 Dokumen	200.000.000
3.0.03.01.0.0.00.17.003	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	Pekanbaru	2 dokumen	150.000.000		Pekanbaru	2 dokumen	556.270.000
3.0.03.01.0.0.00.17.005	Pemberian beasiswa tugas belajar	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	Luar Daerah	33 orang	3.400.000.000		Luar Daerah	72 orang	9.660.600.000
3.0.03.01.0.0.00.17.006	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	Luar Daerah	1 orang	81.483.600		Luar Daerah	1 orang	81.483.600
3.0.03.01.0.0.00.17.007	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	Luar Daerah	4 orang	200.000.000		Luar Daerah	6 orang	791.104.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.0.03.01.0.0.00.17.008	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti <u>Diklat Fungsional</u>	Luar Daerah	10 Orang	200.000.000		Luar Daerah	60 Orang	923.588.300
3.0.03.01.0.0.00.17.009	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Luar Daerah	10 Orang	200.000.000		Luar Daerah	45 Orang	717.386.000
3.0.03.01.0.0.00.17.011	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	Pekanbaru dan Luar Daerah	20 Orang	246.808.000		Pekanbaru dan Luar Daerah	20 Orang	546.808.000
3.0.03.01.0.0.00.17.012	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	Luar Daerah	5 Orang	200.000.000		Luar Daerah	20 Orang	1.000.000.000
3.0.03.01.0.0.00.17.013	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling	Pekanbaru	42 orang	94.428.422		Pekanbaru	80 orang	113.000.000
3.0.03.01.0.0.00.17.014	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	Pekanbaru dan Kab/Kota	12 kali	107.135.100		Pekanbaru dan Kab/Kota	12 kali	150.000.000
3.0.03.01.0.0.00.17.015	Pembangunan database terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN	Jumlah data base yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	Pekanbaru	1 data base	67.614.000				
3.0.03.01.0.0.00.17.016	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	Luar daerah	5 Orang	400.000.000		Luar daerah	22 Orang	1.000.000.000
3.0.03.01.0.0.00.17.017	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	Pekanbaru, Kabupaten/kota dan Luar Daerah	5 agenda	100.000.000		Pekanbaru, Kabupaten/kota dan Luar Daerah	5 agenda	981.250.300
					16.065.525.144				32.841.595.700

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2020**

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.0.03.01.3.0.03.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				16.065.525.144,00			32.721.595.700,00
3.0.03.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	5.716.589.200,00		100 Persen	7.151.918.400,00
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Pekanbaru	2,500 Surat	13.940.250,00		2,500 Surat	23.514.000,00
3.0.03.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Pekanbaru	24 Rekening	1.000.810.000,00		24 Rekening	1.334.823.600,00
3.0.03.01.0.0.00.01.003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pekanbaru	10 Unit	200.000.000,00		80 Unit	500.000.000,00
3.0.03.01.0.0.00.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	750.000.000,00		12 Bulan	926.158.200,00
3.0.03.01.0.0.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pekanbaru	14 Unit	170.000.000,00		14 Unit	243.516.800,00
3.0.03.01.0.0.00.01.007	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Pekanbaru	20 Jenis	135.866.900,00		25 Jenis	149.454.400,00
3.0.03.01.0.0.00.01.008	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Pekanbaru	25 Jenis	118.513.250,00		30 Jenis	130.366.900,00
3.0.03.01.0.0.00.01.009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pekanbaru	31 Jenis	70.691.800,00		31 Jenis	99.861.000,00
3.0.03.01.0.0.00.01.010	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pekanbaru	6,400 Porsi	165.015.000,00		6,400 Porsi	181.500.000,00
3.0.03.01.0.0.00.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah dan Kabupaten	130 Kali	800.000.000,00		160 Kali	1.089.413.800,00
3.0.03.01.0.0.00.01.012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	2,220 OB	1.500.000.000,00		2,220 OB	1.500.000.000,00
3.0.03.01.0.0.00.01.013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Pekanbaru	276 OB	791.752.000,00		276 OB	973.309.700,00
3.0.03.01.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	800.000.000,00		100 Persen	766.200.000,00
3.0.03.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	2 Ruang	600.000.000,00		2 Ruang	500.000.000,00
3.0.03.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	300 Unit	200.000.000,00		300 Unit	266.200.000,00
3.0.03.01.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	240.000.000,00		100 Persen	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.0.03.01.0.0.00.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	135 Stel	120.000.000,00		135 Stel	0,00
3.0.03.01.0.0.00.03.003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Pekanbaru	135 Stel	120.000.000,00		0 Stel	0,00
3.0.03.01.3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pelayanan ASN yang Terselenggarakan		100 Persen	3.691.466.822,00		100 Persen	7.931.987.100,00
3.0.03.01.3.0.03.15.001	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah dokumen	Pekanbaru	2 Dokumen	126.166.733,00		1 Dokumen	203.274.900,00
3.0.03.01.3.0.03.15.002	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	Pekanbaru	2.500 Data Elektronik	80.756.100,00		2.500 Data Elektronik	285.748.700,00
3.0.03.01.3.0.03.15.003	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	Pekanbaru	350 Orang	250.000.000,00		350 Orang	871.503.900,00
3.0.03.01.3.0.03.15.004	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	Luar Daerah	126 Orang	250.000.000,00		126 Orang	396.924.100,00
3.0.03.01.3.0.03.15.005	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Pekanbaru dan Kabupaten	200 Orang	79.700.980,00		198 Orang	180.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.15.007	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan	Pekanbaru	1 Dokumen	307.591.507,00		1 Dokumen	424.773.800,00
3.0.03.01.3.0.03.15.008	Pengelolaan Penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	Pekanbaru	1 Dokumen	160.628.502,00		1 Dokumen	405.080.900,00
3.0.03.01.3.0.03.15.009	Penyusunan Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi	Jumlah dokumen analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi yang tersusun	Pekanbaru	1 Dokumen	50.000.000,00		1 Dokumen	150.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.15.010	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	Pekanbaru	2 Dokumen	350.000.000,00		2 Dokumen	930.438.300,00
3.0.03.01.3.0.03.15.011	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	Pekanbaru dan Kabupaten kota	1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	684.720.000,00
3.0.03.01.3.0.03.15.012	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	Pekanbaru	2 Modul	200.000.000,00		2 Modul	521.391.900,00
3.0.03.01.3.0.03.15.013	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	Pekanbaru	1 Modul	101.766.000,00		1 Modul	313.909.400,00
3.0.03.01.3.0.03.15.015	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah sertifikat akreditasi UPT penilaian kompetensi Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Sertifikat Akreditasi	100.000.000,00		1 Sertifikat Akreditasi	0,00
3.0.03.01.3.0.03.15.016	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	Pekanbaru	350 Orang	150.000.000,00		350 Orang	290.741.000,00
3.0.03.01.3.0.03.15.017	Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota Se-Propinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola	Pekanbaru, Kabupaten Kota dan Luar daerah	4.000 Berkas	624.555.000,00		4.000 Berkas	1.017.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.15.018	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	Pekanbaru , Kabupaten Kota dan Luar daerah	600 Orang	300.000.000,00		600 Orang	498.794.800,00
3.0.03.01.3.0.03.15.019	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	1.000 Orang	90.302.000,00		1.000 Orang	192.544.000,00
3.0.03.01.3.0.03.15.020	Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	Pekanbaru	359 Dokumen	70.000.000,00		359 Dokumen	150.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.0.03.01.3.0.03.15.021	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	Pekanbaru	70 Kasus	200.000.000,00		70 Kasus	415.141.400,00
3.0.03.01.3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pembinaan dan pengembangan apratur		100 Persen	5.617.469.122,00		100 Persen	16.871.490.200,00
3.0.03.01.3.0.03.17.001	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	Pekanbaru	2 Dokumen	70.000.000,00		2 Dokumen	150.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.002	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	Pekanbaru	1 Dokumen	100.000.000,00		1 Dokumen	200.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.003	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah dokumen pemetaan, evaluasi dan talent pool	Pekanbaru	2 Dokumen	150.000.000,00		2 Dokumen	556.270.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.005	Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	Luar Daerah	33 Orang	3.400.000.000,00		72 Orang	9.660.600.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.006	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I	Luar Daerah	1 Orang	81.483.600,00		1 Orang	81.483.600,00
3.0.03.01.3.0.03.17.007	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk II	Luar Daerah	4 Orang	200.000.000,00		6 Orang	791.104.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.008	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	Luar Daerah	10 Orang	200.000.000,00		60 Orang	923.588.300,00
3.0.03.01.3.0.03.17.009	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Luar Daerah	10 Orang	200.000.000,00		45 Orang	717.386.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.011	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi asesor	Pekanbaru dan Luar Daerah	20 Orang	246.808.000,00		20 Orang	546.808.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.012	Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	Luar Daerah	5 Orang	200.000.000,00		20 Orang	1.000.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.013	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling	Pekanbaru	42 Orang	94.428.422,00		80 Orang	113.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.014	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	Pekanbaru dan Kabupaten kota	12 Kali	107.135.100,00		12 Kali	150.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.015	Pembangunan Database Terkait Pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah database yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	Pekanbaru	1 Data Base	67.614.000,00		0 Data Base	0,00
3.0.03.01.3.0.03.17.016	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan Berkinerja Baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	Luar Daerah	5 Orang	400.000.000,00		22 Orang	1.000.000.000,00
3.0.03.01.3.0.03.17.017	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	Pekanbaru, Kabupaten kota dan Luar Daerah	5 Agenda	100.000.000,00		5 Agenda	981.250.300,00
J U M L A H					16.065.525.144,00			32.721.595.700,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 memuat program kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renja disusun berpedoman kepada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan RKPD Provinsi Riau. Renja menjadi sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penyusunan Renja merupakan salah bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel. Disamping itu Renja juga merupakan tolak ukur capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, baik yang dilakukan secara individu, tim maupun institusi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 adalah pengelolaan manajemen aparatur sipil negara dan penerapan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan, kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dengan melakukan perubahan dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan penerapan prinsip merit diharapkan mampu menghasilkan Pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya perubahan pengelolaan manajemen tersebut pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah ke depannya perlu menyiapkan sarana

dan prasarana pendukung, disertai dengan dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.

Pekanbaru, 12 Agustus 2019
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001